



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227/KEP-25.2/IV/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
YANG BERPOTENSI KONFLIK STRATEGIS

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang berpotensi konflik strategis antara Masyarakat dengan Badan Hukum, Masyarakat dengan Instansi Pemerintah dan Antar Kelompok Masyarakat, telah dibentuk Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Berpotensi Konflik Strategis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 366/KEP-25.2/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
- b. bahwa sesuai Diktum KELIMA Keputusan tersebut huruf a, jika pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang berpotensi konflik strategis tersebut belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya
- c. bahwa berhubung huruf a dan b serta adanya penambahan kasus yang akan ditangani serta telah tersedianya anggaran dalam DIPA Tahun 2013, dipandang perlu penetapannya dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo No. 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 67/M Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN YANG BERPOTENSI KONFLIK STRATEGIS.

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang Berpotensi Konflik Strategis yang selanjutnya disebut Tim, terdiri atas Tim Pengendali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	:	Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Ketua	:	Direktur Konflik Pertanahan
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,

dengan Wakil Ketua, Anggota, Jabatan, Kedudukan dalam Tim, serta permasalahan yang ditangani dan Sekretariat sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penelitian data fisik, data yuridis maupun data administrasi tanah yang menjadi objek pengkajian dan penanganan;
2. Melakukan pengkajian dan penanganan terhadap kasus pertanahan serta mengupayakan penyelesaian berdasarkan kriteria penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Kasus Pertanahan;
3. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, maupun kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan Dinas/ Instansi terkait, guna penyiapan konsep kebijakan dalam rangka pengkajian dan penanganan kasus-kasus pertanahan tersebut;
4. Melakukan tugas pembantuan dalam rangka pengkajian dan penanganan kasus pertanahan di Daerah;
5. Melaksanakan gelar kasus baik internal, eksternal, mediasi maupun gelar istimewa terhadap setiap kasus pertanahan yang telah dilakukan pengkajian dan penanganan;

6. Menyiapkan...

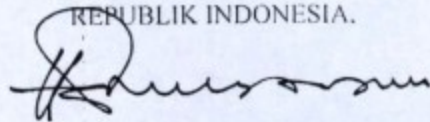
6. Menyiapkan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditujukan kepada pihak yang bersengketa, maupun lembaga atau instansi terkait, mengenai penyelesaian yang ditempuh sesuai dengan kriteria sebagaimana pada angka 2 di atas;
7. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan/atau instansi terkait lainnya guna pengkajian dan penanganan dalam rangka penyelesaian permasalahannya.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu Tim dapat meminta keterangan dari Ahli, Pakar, Akademisi maupun masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang membidangi pertanahan.
- KELIMA : Jika dalam pelaksanaannya, ternyata pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang berpotensi konflik strategis tersebut belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka pengkajian dan penanganannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 366/Kep-25.2/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dilanjutkan dan dibiayai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor DIPA-056.01.1.429621/2013 Tanggal 5 Desember 2012 MAK : 056.01.06.2981.006.002.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor DIPA-056.01.1.429621/2013 Tanggal 5 Desember 2012 MAK : 056.01.06.2981.006.002.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 366/KEP-25.2/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Berpotensi Konflik Strategis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.



HENDARMAN SUPANDJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Menteri...

4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
8. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
11. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
12. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Pejabat Eselon I Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14. Pejabat Eselon II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia;
16. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
17. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
 Nomor : 227/KEP-25.2/IV/2013
 Tanggal : 4 April 2013

Susunan Tim		Kedudukan Dalam Tim	Kasus	Waktu Penyelesaian	Sekretariat
No	Nama				
1	2	3	4	5	6
Tim I (Satu)					
1.	Andjar Setiana, S.H.	Direktur Perkara Pertanahan	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah Negeri Halong, Kota Ambon, Provinsi Maluku.	Glavi Cindra Awisda, S.H.
	Drs. Roli Irawan, SH., MM., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	Anggota	2. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan Kementerian RI terletak di Negeri Laha, Kota Ambon, Provinsi Maluku.	Ronal Arkines Saragih, S.H.
	Drs. KGS. Zulkifli Anshori Mustofa, M.Si.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku	Anggota	3. Permasalahan tanah trans SP III Palembang antara masyarakat dengan PT. London Sumatera Tbk. terletak di Desa Suka Makmur, Kec. Gunay, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	Sri Dewi Marina Putri, SH
	Djama'uddin, SH., M.Hum.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota		
	Drs. Afrizal, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan	Anggota		
	Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc.	Kasubdit Batas Bidang Tanah	Anggota		
	Gembong Joko Wuryanto, SH, M.Si.	Kasubdit Perkara Wilayah I	Anggota		
	Hadiat Sondara Danasaputra, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Barat	Anggota		

Adeeltje Patinama, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Maluku	Anggota	4. Pembatalan 9 Sertipikat (Hak Pakai Pemprov. Jabar, PT. Taspen, TNI AL, Bank Mandiri, dkk.) dari ahli waris Dirdja Patinggi terletak di Kel. Ciarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung. Povinsi Jawa Barat.		
Budi Suryanto, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan	Anggota	5. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Artia Priigel, terletak di Desa Padang Lengkuas, Kabupaten Lahat. Provinsi Sumatera Selatan.		
Bintarwan Widhiatso, SH, M. Kn.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta	Anggota	6. Permasalahan tanah kav. No. 63 Sudirman antara PT. Graha Metropolitan Nuansa dengan PT. Harang Ganiang di Jl. Jend Sudirman, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.		
Abgrid Pranowo, SH., CN.	Kasi Perkara TUN Wilayah I	Anggota			
Hotman Pardomuan Siahaan, S.H., M. Kn.	Kasi Sengketa Batas dan Letak Wilayah	Anggota			

1	2	3	4	5	6	7
Tim 2 (Dua)						
2.	Monsel Hutagaol, S.H., MH.	Direktur Sengketa Pertanahan	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah HGB No. 58/Cihaugeutis atas nama PT. Telkom Indonesia, Tbk dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral/Badan Geologi, terletak di Jalan Sentot Aibasyah No. 2 - 4, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.		Dwi Ratnawati S.ST.
	DR. Drs. Ronsen Pasaribu, SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau	Anggota	2. Permasalahan tanah HGB No. 205/Hegarnamah an. M. Yusuf Zaenal, dengan Dinas Pekerjaan Umum, terletak di Kelurahan Hegarnamah, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.		Yayuk Santika, A.Md
	Drs. Roli Irawan, SH., MM., MH	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	Anggota			Helen Melinda Siagian, SH
	Binsar Simbolon, SH., M.Si	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu	Anggota			
	Ir. Agus Junaidi	Kasubdit Terestris dan Citra Penginderaan Jauh	Anggota			
	Albert Muntarie, ST., MH.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi	Anggota			
	Mangapul, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Riau	Anggota	3. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PTPN V atas tanah seluas 2.800 Ha terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.		
	Hadiat Sondara Danasaputra, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Barat	Anggota	4. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Martia Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.		

Alfi Ritamisi SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Bengkulu	Anggota	5. Permasalahan tanah HGU PT. Cipta Daya Sejati Luhur seluas 268 ha sebagian dari luas keseluruhan 3.671 ha yang secara fisik dikuasai oleh Kelompok Tani Makmur Sejati, terletak di Desa Lubuk Ogong Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan Provinsi Riau.	
M. Yusuf, SH.	Kasi Sengketa Kepemilikan	Anggota		
Ignatius Ardi Susanto, S.H.	Kasi Perkara Perdata Wilayah I	Anggota	6. Permasalahan tanah antara POLDA Bengkulu dengan -Kelompok ahli waris Koestomo PA terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.	

1	2	3	4	5	6	7
Tim 3 (Tiga)						
3.	Bambang Tri Suryo Binantoro, S.H., M.Si.	Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.		Novita Dwi Wulandari, S.H. Marcellinus Wendarto, S.H.
	Ir. Roni Kusuma Yudistiro, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara	Anggota	2. Permasalahan tanah antara masyarakat Kel. Sarirejo dengan TNI AU (Polonia), terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.		
	Ir. Rowland P. Sidjabat, M.Sc.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo	Anggota	3. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Dinamika Inti Sentosa, terletak di Kec. Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.		
	Drs. Syafriaman, SH., M.Hum.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten	Anggota	4. Permasalahan tanah PT. Rasmanik Tonalia mineral dengan HGU Perkebunan Tebu PG Gorontalo, terletak di Desa Sripi dan Mekarwangi, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo.		
	Dr. Supriyadi, S.H. M.Hum.	Kasubdit Konflik Masyarakat dan Badan Hukum	Anggota			
	Ety Juliani Pasoreh, SH., M.Si	Kasubdit. Kerjasama Pemberdayaan	Anggota			
	Darmagalih Widhastha, SH., M.Hum.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantwil BPN Prov. Sumatera Utara	Anggota			
	La Ode Muhammad Ruslan Emba, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantwil BPN Prov. Gorontalo	Anggota			

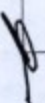
Handwritten signature

H. Dede Surahman, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Banten	Anggota	5. Permasalahan Sertipikat HPL No. 1/Cipondoh an Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.261.757 m ² terletak di Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh, Kel. Cipete&Kunciran Jaya Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.	
M. Zainal Arifin, A.Pinh.	Kasi Wilayah Perbatasan dan Konservasi Direktorat Pemetaan Tematik	Anggota		
Suharno, S.H.	Kasi Sengketa Batas Wilayah	Anggota		
Farida Widyartati, S.H., M.Si.	Kasi Perkara TUN Wilayah II	Anggota		



1	2	3	4	5	6	7
Tim 4 (Empat)						
4.	Maharani Putri R. SH, MM.	Inspektur Wilayah V	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Desa Sukamulya, Kertajaya, dan Tamansari, di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.		Rury Pristiana Puspining Ayuk. S.Kom.
	Drs. Rofi Irawan, SH., MM., MH	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	Anggota	2. Permasalahan tanah Hak Milik an. 1 Ketut Kandi, dkk seluas ± 60 Ha, terletak di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.		Fipit Maria, S.Sos
	Drs. Heri Santoso	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali	Anggota	3. Permasalahan tanah antara masyarakat di Kecamatan Teluk Jambe dengan PT. SAMIP (Sumber Air Mas Pratama) di Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.		
	Teuku Mardani, SH., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi	Anggota	4. Putusan inkraacht (TUN) Hak Pakai No.1/Jatikarya Bekasi Provinsi Jawa Barat.		
	Dr. Aslan Noor, SH, S.Pi.	Kabid Kajian Kebijakan	Anggota			
	Rosalina Tamba, S.H.	Kasubdit Sengketa Land Reform	Anggota			
	Hasan Basri Natamenggala, SH.	Kasubdit. Penguasaan Tanah Objek Landreform dan Ganti Kerugian	Anggota			
	Hadai Sondara Danasaputra, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Karwil BPN Prov. Jawa Barat	Anggota			

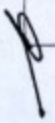
I Ketut Suvartha, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Bali	Anggota	5. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Jambi Argo Wijaya, terletak di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi.		
Santoso, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jambi	Anggota	6. Permasalahan tanah antara masyarakat Desa Sungai Parit (240 KK) dan Desa Sungai Gelam (200 KK) dengan PT. Bahari Gembira Ria di Provinsi Jambi.		
Siti Hafsiyah, S.H.	Kasi Perkara TLN Wilayah III	Anggota			



1	2	3	4	5	6	7
Tim 5 (Lima)						
5.	Drs. Suhaily Syam, SH., MM.	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis, terletak di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.		Zimamun Niam Aulawi, S.H.
	Drs. H. Afrizal, M.M.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan	Anggota	2. Permasalahan tanah antara PT. Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam Kelompok 113, terletak di Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi.		Dwi Lestari
	Teuku Murdani, SH., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi	Anggota	3. Permasalahan tanah antara Masyarakat/Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu dengan Perum Perhutani terletak di Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur.		
	Ir. Subowo Meru, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa-Timur	Anggota			
	Ir. H. Ratmono, M.Si.	Kasubdit Sistem Informasi Bidang Tanah	Anggota			
	Sri Untari, SH.	Kasubdit Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama	Anggota			
	Budi Suryanto, SH, MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan	Anggota			
	Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota			

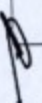
Handwritten signature

Santoso, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jambi	Anggota	4. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Sentosa Mulia Bahagia terletak di Desa Simpang Tungkal, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.		
M. Faran Fahir, S.H.	Kasi Konflik Antara Pemerintah Daerah.	Anggota	5. Permasalahan tanah HGU a.n PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML) dengan Masyarakat terletak di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.		
Mursyidno, A.Pinh.	Staf Seksi Sengketa Kepemilikan	Anggota	6. Permasalahan tanah HGU A.n. PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) dengan Kelompok Tani Sinar Mulia Provinsi Jambi.		



1	2	3	4	5	6	7
Tim 6 (Enam)						
6.	Ir. H. Duddy Imron Cholid, MS	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah Hak Pakai No. 1/Alastlogo A.n. Dephankam Cq. TNI AL antara masyarakat Desa Atas Tlogo dengan TNI AL terletak di Grati, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.		Endang Dyah Ayu Piatoka, S.H.
	Ir. Subowo Meryu, MM	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota	2. Permasalahan tanah antara masyarakat Tubanan dengan PT Darmo Permai, terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.		Indah Susilowati, S.H.
	Dr. Drs. Ronsen Pasaribu, SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau	Anggota			Astri Kauni Sari.
	Dr. Josias Benyamin Lona	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota			
	Ir. Bambang Ardiantoro, M.Sc.	Kabag. Pemantauan dan Evaluasi	Anggota	3. Permasalahan tanah di Desa Curah - nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.		
	Ir. Dudi Prayudih	Kasubdit Tematik Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota	4. Permasalahan tanah masyarakat adat Suku Melayu Hamba Radja Negeri Koeboe di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.		
	Isman Hadi, SH, M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota	5. Permasalahan antara Ahli waris Leonard Tomboy melawan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
	Mangapul, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Kanwil BPN Prov. Riau	Anggota			

Hendrikus Rema, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Nusa Tenggara Timur	Anggota	6. Permasalahan tanah antara TNI Angkatan Darat cq. Kodam V/Brawijaya dengan masyarakat Desa Geger, terletak di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.		
Muhammad Aziz, SH.	Kasi Kawasan Perkotaan, Direktorat Pemetaan Tematik	Anggota			
Fatimah, S.H.	Kasi Ganti Kerugian	Anggota			
Imanuddin Zaky, SE.	Staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	Anggota			



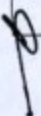
1	2	3	4	5	6	7
Tim 7 (Tujuh)						
7.	Erna M. Mochtar, SH., M.Si.	Inspektur Wilayah II	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan Tanah Eks. HGU antara PT. Tobea dengan masyarakat Desa Lakarana. Moasi dan Wangkolabu. di Kec. Tobea, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.		Pandu Adi Purnomo, S.H.
	Drs. H. Muhammad Hikmad, MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota			Anderson Sauman Pahala, S.H.
	Ir. Subowo Meru, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota			Ardhinila Widoari Putri.
	Made Ngurah Pariatna, SH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	2. Permasalahan tanah eks. HGU PT. Perkebunan Tompenan yang telah dikuasai oleh masyarakat desa Lambelu dan telah terbentuk 3 (tiga) desa definitif, desa Lambelu, di Kec. Pasir Putih, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.		
	Dr.Drs. Ronsen Pasaribu, SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau	Anggota			
	Admiral Faisal, SH., M.Si.	Kasubdit Sengketa Fisik	Anggota			
	Ir. Djoko Kusanto Hadibroto, M. Eng, Sc.	Kasubdit Program dan Kendali Mutu	Anggota	3. Permasalahan Tanah PT. Pupuk Kaltim dengan Majelis Perjuangan Rakyat Perwakilan Masyarakat Gunung Kempeng, Pada ldi, dan H. Daeng Masserang Provinsi Kalimantan Timur.		
	Husaini, SH., M.Kn.	Kasubdit HGU	Anggota			
	Arifin, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tenggara	Anggota			

Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota	4. Permasalahan Tanah HGU atas nama PT. Dewi Sri dengan masyarakat Desa Ngadirejo, Kecamatan Wingi atas tanah perkebunan sengon seluas 198,1030 Ha dan 319,6450 Ha. terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wingi, Kabupaten Bitar, Provinsi Jawa Timur.		
Supa'at, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Timur	Anggota	5. Permasalahan tanah HGU an- PT. Kismo Hindayani dengan masyarakat atas tanah perkebunan nyunwur seluas 368,0000 Ha terletak di Desa Soso, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Bitar, Provinsi Jawa Timur.		
Mangapul, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Riau	Anggota	6. Permasalahan tanah antara Kelompok Tani Indah Pusako dengan PT. Meridan Sejati Surya Plantation, terletak di Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.		
Drs. Dadan Haeedar	Kasi Sengketa Objek Land Reform	Anggota			



1	2	3	4	5	6	7
Tim 8 (Delapan)						
8.	Ir. Heru Susanto Wartiono	Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara PT. Jembyan Muara Bara dengan masyarakat transmigrasi Swa karsa Mandiri yang terletak di Desa Bhuana Jaya, Kec. Tenggaraong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.		Ir. Hartono Iman Matvina Yusuf Putra, S.H. Wahyu Arhamadji S.W., SH.
	Ir. Subowo Merti, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota			
	Made Ngurah Pariatna, SH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	2. Permasalahan tanah antara FNI AU dengan punawirawan atas tanah seluas 623,080 m ² , terletak di Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.		
	Ir. Roni Kusuma Yudistiro, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara	Anggota			
	A. Samad Soemarga, SH., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah	Anggota	3. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Soeloeng Laet atas tanah seluas 953, 21 Ha, terletak di Kec. Dolok Masinul dan Bamban, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.		
	Supardy Marbun, SH. M.Hum.	Kasubdit Konflik Lembaga	Anggota			
	Ir. Nathan Wahyudianto, M.Eng.Sc.	Kasubdit Pengukuran dan Pemetaan Kerangka Dasar	Anggota			
	Mardiaty Permana Lestari, SH.	Kasubdit Pengelolaan Tanah Terlantar	Anggota			
	Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota			

Supat, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Timur	Anggota	4. Permasalahan antara HGU PT. Hasfarn Product Pinang Manis/PT. Budiduta Agro Makmur dengan Masyarakat di Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.		
Darmagali Widihasda, SH., M.Hüm.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara	Anggota	5. Permasalahan tanah antara masyarakat Kecamatan Ngancar dan PT. Sumber Sari Petung, di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.		
Triyono, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah	Anggota	6. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan TNI AD, terletak di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.		
Pratiwi, SH.	Kepala Seksi Perdata Wilayah II	Anggota			



1	2	3	4	5	6	7
Tim 9 (Semblan)						
9.	Dr. Drs. J.P. Tantomio, M.Eng.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan Tanah seluas 16.600 M2 antara PT. Ariatoka dengan PT. Mahkota Real Estate, PT. Taspen, Widodo Sukarno, Menteri Keuangan RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta, terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. No.2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.		Andre Setiabudi Iskandar, S.H.
	Djamaluddin, SH, M.Hum.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota			Bugi Riyantoro, SH.
	Ir. Roni Kusuma Yudistiro, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara	Anggota			
	Ir. Esu Prajoko, M.Si.	Kasubdit Wilayah Administrasi Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Anggota			
	Ign. Dwi Priyo Sudarsono, SH.	Kasubdit Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Sektor	Anggota	2. Permasalahan tanah antara masyarakat Desa Lubuk Kasih dengan PT. Jaya Baru Pertama, terletak di Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kec. Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.		
	Binarwan Widhiastio, SH., M.Kn.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta	Anggota	3. Permasalahan tanah eks Eigendom Verponding No. 7287 an. Moara, es terletak di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.		
	Danargalih Widiastha, SH., M.Hum.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara	Anggota			

Suwardi, SH. Luki Pematasari, SE.	Kepala Seksi Perdata Wilayah III Staf Subdit Sengketa Fisik	Anggota Anggota	4. Pemmasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Anugerah Langkat Makmur terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. 5. Putusan inkraacht (perdata) HGB No. 2399/Kapuk a.n. Pertamina terletak di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. 6. Pemmasalahan tanah eks EV No. 6431 seluas 9,74 ha antara Toton, cs dengan PT. Metropolitan Kencana, terletak di Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.		



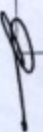
1	2	3	4	5	6	7
Tim 10 (Sepuluh)						
10.	DR. H.S. Muhammad Ikhsan. SH., M.Si. M.H.	Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan Tumpang Tindih HGU PT Gawi Makmur Kalimantan dengan Jln Usaha Pertambangan PT. Prafa Coal Mining, terletak di Desa Damit Hulu sebelah Barat, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.		Seri Maharani Boru Karo SH.
	H. Muchtar Deluma. SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota			Rhido Fahri Budiman, S.H
	Drs. H. Sayuthi Is, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota			Dessy Ariyani, A.Md
	Drs. Roli Irawan. SH., MM., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	Anggota	2. Permasalahan tanah antara NV. Perkebunan Gambar dengan masyarakat seluas 825,4360 Ha terletak di Desa Sumber Sari, Kecamatan Nglegek, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.		
	Ir. Subowo Merti, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota			
	Ir. Gunawan, MM.	Kasubdit Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perairan	Anggota	3. Permasalahan tanah HGU PT. Semen Dwima Agung dengan masyarakat atas tanah Perkebunan Gondang Tapien seluas 567,3800 Ha dan 287,1900 Ha terletak di Desa Gondang Tapien, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.		
	Sunu Duto Widjomarmo, SH., M.Kn.	Kasubdit Perkara Wilayah II	Anggota			
	Bambang Setyawan Priyocahyo, SH.	Kasubdit Penerapan Pertanahan	Anggota			

[Signature]

Suradi Hasan, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tengah	Anggota	4. Permasalahan tanah HGU a.n.PT. Cakung Permata Nusa dengan Masyarakat terletak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.		
Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota	5. Permasalahan tanah HGU PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan Masyarakat, terletak di Kec. Toili, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.		
H. Abdul Manan SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Selatan.	Anggota	6. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan TNI AU/Lanud Atang Sendjaja, terletak di Desa Bojong dan Desa Semplak, Kecamatan Kemang, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.		
Hadiat Sondara Danasaputra SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Barat.	Anggota			
Sri Hartono, SH.	Kasi Sengketa Penguasaan	Anggota			

1	2	3	4	5	6	7
Tim II (Sebelas)						
11.	Ir. Tri Suprianto, SH, M.Si	Direktur Pemetaan Tematik	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara PT. BSNM dengan masyarakat Desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Desa Nipah Kuning, Kec. Mesuji, Kab. Lampung, Provinsi Lampung.		Usiawati, A. Md
	Ir. H.M. Najib Taufiq, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	2. Permasalahan Tanah antara masyarakat Desa Bakung Ilir dan Bakung Udik dengan PT. Garuda Panca Artha, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung.		Mayri Rahmawati, A.Md
	Ir. Subowo Meru, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota			
	Ir. Agus Wijyana, M.Eng.Sc.	Kasubdit Tematik Wilayah Khusus	Anggota	3. Permasalahan tanah HGU A.n. PTPN XII (Persero) dengan masyarakat. terletak di Kebun Renteng dan Sidomulyo Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.		
	Didik Bangun Restuaji, SH.	Kasubdit Perkara Wilayah III	Anggota	4. Permasalahan tanah HGU A.n. PTPN XI (Persero) dengan masyarakat seluas 2.720.500 m ² , terletak di Spada Nogosari PG. Semboro Kec. Rambipuji Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.		
	Ir. Ali Rintop Siregar	Kasubdit Pengelolaan Tanah	Anggota			
	Suryo Kusumo, SH., M.Hum.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov.Lampung	Anggota			
	Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota			

Seti Kuncoro, S.Si., MM.	Kepala Seksi Konflik Antar Kelompok Masyarakat	Anggota	5. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti atas tanah seluas 225,41 Ha terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.		
Anik Sudarwati, S.H.	Staf Seksi Sengketa Penyelesaian	Anggota			
Dassler Binsar Hasudungan Arionang, SH.	Staf Subdit Konflik Kelompok Masyarakat	Anggota	6. Permasalahan tanah HGU U/1/L tahun 1984 antara masyarakat Kampung Surabaya dan Padang Ratu dengan PT. Sahang Bandar Lampung terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.		



1	2	3	4	5	6	7
Tim 12 (Dua Belas)						
12.	Drs. H. Teddy Rukfadi	Direktur Masyarakat dan Kembangan	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PT. KAI terletak di Desa Miji, Kec. Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.		Dwi Astuti, S.Si.
Ir. Subowo Meru, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Anggota		2. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan PTPN XII atas tanah seluas 4.826, 84 Ha, terletak di Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.		Dimas Tri Suryanto, A.Md
RB. Agus Widjayanto SH., M.Hum	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat	Anggota				Dwi Artis Feddyawan.
Drs. Roli Irawan, SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	Anggota				
Ir. Drs. Gunawan Sasmita, MPA.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota				
Dra. Wiwik Harti Fatimah	Kasubdit Pengembangan Penilaian Tanah	Anggota		3. Permasalahan tanah antara masyarakat petani karet Pirsus II terletak di Bukit Talao, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima puluh kota, Provinsi Sumatera Barat.		
Ery Suwondo, SH.	Kasubdit Pendaftaran Hak	Anggota				
Subendro, SH., M.Hum.	Kasubdit Penataan Tanah Bersama	Anggota		4. Permasalahan tanah HGU a.n.PT. Sawit Graha Manunggal dengan Masyarakat, terletak di Desa Patung, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.		
Isman Hadi, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Timur	Anggota				

Rita Sasra, SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sumatera Barat	Anggota	5. Kasus tumpang tindih 34 SHM dengan aset Kenhankam/TNI AU luas ± 85.825 Ha terletak di Ujung Genteng Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.		
Hendri Rustandi Butar Butar, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah	Anggota	6. Pemeralahan tanah antara Kementerian PU dengan Iwan NG SHM No.1590 terletak di Desa Marga Jaya Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.		
Hadiat Sondara Danasaputra SH., MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Barat	Anggota			
Drs. Agus Sugianto, S.H., M.Hum.	Kasi Konflik Masyarakat dengan Badan Hukum Privat	Anggota			
Lucky Ariansyah, SH., MH.	Staf Seksi Perkara Wilayah III	Anggota			

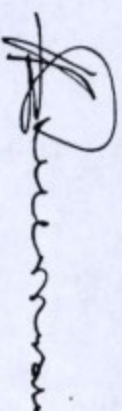
1	2	3	4	5	6	7
Tim 13 (Tiga Belas)						
13.	Ir. Djoko Dwi Tjiptanto	Direktur Pemetaan Dasar	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan tanah bekas HGU PTPN IX (Persero) Afdeling Gunung Panenjoan dengan masyarakat Desa bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.		Reskah Hartati, S.H
	Samad Soemarga, SH., MH	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah	Anggota			Christine Thyas Manik, S.H
	Dr Drs. Ronsen Pasaribu SH., MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau	Anggota	2. Permasalahan tanah HGU a.n. PT. Subur Arum Makmur (PT. SAM) dengan Masyarakat, terletak di Kel. Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.		
	Ir. Najib Taufiq, MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	3. Pembatalan Sertipikat HGU No. 06/Mgl tahun 1989 dan No. 22 Tahun 1995 an. PT. Citra Lantorogung Persada di Kabupaten Tulang Bawang. Provinsi Lampung.		
	Teddy Setiady, SH., CN.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	4. Permasalahan tanah transmigrasi antara masyarakat trans swakarsa mandiri dengan PT. BNIL, terletak di Kabupaten Tulang Bawang. Provinsi Lampung.		
	Dadang M. Fuad, SH.	Kasubdit Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak	Anggota			
	Ir. Safrin Himawan, M.Si.	Kasubdit Batas Ruang dan Perairan	Anggota			
	Drs. Pelopor, M. Eng.Sc.	Kabid Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan	Anggota			
	Triyono, SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah	Anggota			

Mangapul SH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Riau	Anggota	5. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan pihak Otorita Batam atas tanah terletak di pulau rempang dan galang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.		
Surjo Kusumo, SH., M.Hum.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Lampung	Anggota			
Herryzal Siafri, SH., S.Pi.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kepulauan Riau	Anggota			
Sumarto, S.H., M.Eng.	Kasi Konflik Masyarakat Hukum Adat	Anggota			

1	2	3	4	5	6	7
Tim 14 (Empat Belas)						
14.	M. Noor Marzuki, SH., M.Si	Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Permasalahan Tanah PTPN III. Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun terkait tuntutan masyarakat terhadap PTPN III atas lahan seluas 943 Ha an. Korek dan seluas 251 Ha an. Kemiri, dkk untuk dikeluarkan dari HGU dan dikembalikan kepada Masyarakat Penggarap, khususnya yang terletak di Kecamatan Bandar Betsy Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.		Faisyah Rachmayanti, SH.
Ir. Roni Kusuma Yusdistrino MM.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara	Anggota				Novaditya Sukmawinayyu, S.H.
Deddy Setiady, SH.	Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara	Anggota				
H.S. Ali Jabbar, SH., MH.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara	Anggota				
Elfachri Budiman, SH., M.Hum.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota		2. Permasalahan tanah antara masyarakat (Kelompok Tani PATAMA) dengan PT. Blungkur, terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.		
Drs. Kintor Eko Baskoro, MH.	Kasubdit Penetapan Hak Tanah	Anggota				
Dra. Sjane Ellen Kasonso, M.Si.	Kasubdit Tematik Kawasan	Anggota				
Damargalih Widhashta, SH., M. Hum.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara	Anggota		3. Permasalahan tanah antara masyarakat dengan TNI AU Loe Wattimena Morotai atas tanah seluas 1.125 Ha terletak di Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara.		
H.M. Rocky Soenoko, SH., M.Si.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Kanwil BPN Prov. Maluku Utara	Anggota				

Gunthar W.M Tuturima, SH, MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Utara	Anggota	4. Permasalahan tanah antara Sdr. Iwan Pangemanan dengan Pemerintah Kota Manado atas tanah di Desa Teling Atas, Kec. Wane, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.	
Herry Fatmuraehman, SH, MH.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan	Anggota	5. Putusan inkrah (TUN&Perdata) H.M. 95/Bitung a.n PT. Bank Mandiri Kab. Bitung Prov. Sulawesi Utara.	
Abdul Gani, S.H.	Kasi Konflik Antara Instansi Pemerintah dan Daerah	Anggota	6. Permasalahan tanah HGU a.n. PT. Semesta Margareksa dengan Masyarakat di Kec. Wattang Sidenreng dan Kec. Pitu Riawa dan PT. Boli di Kec. Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan.	
Indah Nur Karichnatun, S.Si	Staf Subdit Konflik Lembaga	Anggota		

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI



Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor : 227/KEP-25.2/IV/2013
Tanggal : 4 April 2013

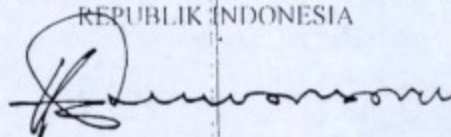
HONORARIUM
TIM PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
YANG BERPOTENSI KONFLIK STRATEGIS
TAHUN 2013

NO.	TIM	HONORARIUM
1.	Pengarah	Rp. 750.000,-/Bulan
2.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-/Bulan
3.	Ketua	Rp. 650.000,-/Bulan
4.	Wakil Ketua	Rp. 600.000,-/Bulan
5.	Sekretaris	Rp. 500.000,-/Bulan
6.	Anggota	Rp. 500.000,-/Bulan

HONORARIUM SEKRETARIAT
TIM PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
YANG BERPOTENSI KONFLIK STRATEGIS
TAHUN 2013

NO.	SEKRETARIAT	HONORARIUM
1.	Ketua	Rp. 250.000,-/Bulan
2.	Anggota	Rp. 220.000,-/Bulan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI